**PENGATURAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP HEWAN
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : Abdurrahman

Pembimbing I : Dr.Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Marsan, Perum Melur Permai Blok Q No. 9, Pekanbaru-Riau

Email : abduelmufti@gmail.com / Telepon : 0812 7009 9482

ABSTRACT

Bestiality, which can also be called zoophilia, is the involvement of contact and sexual activity between humans and animals. Of course it is clear that this action is not in accordance with the norms in the community. The case of Sutarya's grandfather in Bali, the case of a young man with a GA in Bali, the case of a young man with the initials AS in Tasikmalaya, and the case of Hendro in Bone Sulawesi as evidence that this heinous act occurred. Not regulating bestiality in Indonesian law, makes it unclear about law enforcement officials in enforcing the law. So that the sanctions given to the perpetrators who were found proven, in Bali, were given traditional sanctions and carried out traditional ceremonies to clean the souls of the perpetrators, the village, and also the animals that became objects. This act does not only violate the prevailing norms in the community, but also economic losses experienced by animal owners. including a case of bestiality in Tasikmalaya which resulted in 300 chickens dead. Cows belonging to a resident in Bali who were the object of Sutarya's grandfather also had to be drowned in accordance with the local traditional ceremony. Legal certainty is needed to determine more appropriate regulations to be applied uniformly.

The purpose of this study is to determine the arrangement of criminal acts of sexual intercourse with animals in Indonesia. Especially criminal law as ultimum remedium. And to find out the impending criminal law policy regarding sexual intercourse with animals in Indonesia. There are five principles of animal welfare based on legislation and need to be considered by humans as animal owners: free from hunger, thirst, pain, discomfort, fear, feeling depressed, pain, injury, illness, and free to express patterns of behavior normal. In addition, animals must be protected from physical and psychological abuse.

Arrangement of criminal acts of intercourse with animals in Indonesia has not been regulated in writing in the laws and regulations. In the Indonesian Penal Code the law is not regulated concretely. Especially in Article 302 relating to animal abuse. in Article 66 of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health which protects animals from abuse and abuse is not accompanied by criminal sanctions. As well as in the amendment law also does not mention the prohibition of criminal acts of intercourse with animals. Government Regulation Number 95 of 2012 concerning the Health of Veterinary Communities and Animal Welfare also does not regulate bestiality. As well as criminal law policy that is carried out by the method of evolutionary approach that is by amending and inserting new rules in an article relating to violence against animals. letter c Article 501 of RUU KUHP.

Keywords: Arrangements, - Bestiality, - Animals, - Criminal Law Policies.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia, hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrument untuk melayani kebutuhan manusia sekaligus sebagai *canopy* (benteng perlindungan) manusia seutuhnya. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Sehingga hukum sejatinya sejalan dengan sejarah manusia.¹

Dalam kodifikasi hukum di Indonesia, kejahatan kesusilaan termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana ini berbentuk ke berbagai macam tindakan kejahatannya. Sehingga, jika terjadi pelanggaran, maka memiliki sanksi bagi pelakunya jika terbukti. Kejahatan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap salah satu norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, yaitu norma kesusilaan.

Melihat pada Pasal 285 KUHP, Pemerkosaan berlaku terhadap persetujuan manusia dengan manusia ditambah dengan bumbu kekerasan dan paksaan. Seiring berkembangnya kehidupan, maka fenomena dan kejadian terus terjadi serta bermacam bentuknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Prilaku bersetubuh juga terjadi antara manusia dengan hewan. Perbuatan ini dapat dikenal dengan sebutan *zoophilia* atau *bestiality*. *Zoophilia is becoming excited by and/or engaging in sexual activity with animals*.² Zoofilia adalah prilaku yang mendatangkan kesenangan dan/atau terlibat dalam aktifitas seksual dengan binatang. Sedangkan *bestiality* menurut Nam Nguyen dalam kamusnya adalah kejahatan terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang³. Dalam penuntutan untuk konspirasi

melanggar pasal hukum yang melarang pengiriman materi tidak senonoh, Pemerintah menetapkan adanya kelompok seksual menyimpang yang menderita disfungsi seksual yang dikenal sebagai zoofilia⁴.

Pada bulan Agustus 2008, kasus serupa juga terjadi di Bali yang mana pelakunya adalah seorang kakek Kakek Sutarya diketahui menyetubuhi sapi betina ini pukul 09.00 wita, 17 Agustus 2008 lalu. Saat itu, kakek Sutarya tengah mencari rumput ke ladang. Tiba-tiba, dia merasa melihat seorang gadis cantik kemudian mengajaknya berkencan. Padahal kenyataannya, gadis cantik itu tak lain seekor sapi. Perbuatan Sutarya ini dipergoki keponakannya dan kemudian menyebar ke seluruh warga desa.

Untuk mencegah petaka dan kejadian serupa terulang, upacara adat pun digelar. Kakek bernama Sutarya dan sapi itu dibuang ke laut. Sedangkan kandang sapi sebagai TKP juga dibakar. Pembuangan kakek dan sapi itu dilakukan dalam upacara adat bernama Ngelarung yang digelar warga Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali pukul 06.00 Wita, Senin (20/10/2008). Upacara ini bertujuan untuk menyucikan kembali kakek Sutarya serta menghormati sapi betina yang telah disetubuhinya.⁵

Seorang pria di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terpaksa diamankan polisi, lantaran kedapatan menyetubuhi kuda milik warga Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang. Beruntung polisi cepat datang di lokasi kejadian karena Umar alias Hendro, nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Kejadian memalukan ini bermula saat Ilyas melihat pelaku masuk ke kebun di mana dua ekor kuda milik Emmang berada. Kedatangan pelaku ke kebun tersebut membuat warga curiga, sehingga langsung melakukan pengintaian. Apalagi beberapa waktu lalu, Hendro kepergok warga sedang menyetubuhi kuda milik Emmang, namun saat akan ditangkap pria tersebut melarikan diri. Tak

¹ Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1 Mei 2007, hlm. 46.

² Interest of Amicus Curiae, September 2018, "Appendix Section", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 11 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google.

³ Nam Nguyen, *Essential 25000 English-Indonesian Law Dictionary*, diakses di Google Book pada 17 September 2018.

⁴ United States Of America Plaintiff-Appellee, v. Anthony Petrov, Defendant-Appellant, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses pada 12 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia/2>, diakses, pada, 10 September 2018

ingin kehilangan buruannya untuk kedua kalinya, warga pun ekstra waspada. “Pelaku memang sudah diintai, karena yang pertama, usai menyetubuhi kuda, pelaku melarikan diri, sehingga begitu pelaku masuk ke kebun lagi, warga langsung mengintai dan menangkap pelaku,” ujar Ilyas, Kamis (9/5/2013). Singkat cerita, Hendro akhirnya dipergoki oleh warga dan nyaris dihakimi warga, beruntung seorang polisi tak berseragam yang kebetulan sedang melintas ditempat kejadian langsung mengamankan pelaku. Diketahui bahwa pelaku sudah lama bercerai dengan istrinya⁶.

Remaja asal Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku di persidangan bahwa tidak hanya mencabuli bocah, tapi juga menyetubuhi ratusan ayam dan domba. Pemilik ternak dihadirkan untuk mengkroscek kesaksian ini. AS (17) diadili di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya, Jl Siliwangi, Selasa, 17 Desember 2013. Kesaksian AS mengenai persetubuhan terhadap ayam dan domba disampaikan pekan lalu. Sejumlah warga pemilik ternak dihadirkan hari ini. Sesuai keterangan dari kuasa hukum AS, ia memperkosakan 300 ayam, kambing, dan domba. Kambing dan domba masih hidup. AS pun divonis 8 tahun penjara⁷.

Meninjau perbuatan zoofilia atau *bestiality*, di beberapa negara yang telah mengatur perbuatan ini, seperti Afrika Selatan dalam *Part 4 Chapter 2 Sexual Offences Criminal Law (Sexual Offences And Related Matters) Amendment ACT 32 Of 2007* dengan jenis sanksi yang ditentukan oleh Hakim⁸. Seperti kasus Ntando Thembaletu Mankungwini (28/09/2017), seorang pemuda berumur 23 tahun dijatuhi vonis penjara 12 bulan, karena bersetubuh dengan seekor keledai.⁹ Perancis, negara dengan system *Civil Law*, juga melarang perbuatan *bestiality* didalam KUHP nya pada *Article*

521-1¹⁰. Negara Belanda juga melarang perbuatan pencabulan manusia terhadap hewan yang diatur dalam KUHP nya pada artikel 254 dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 1 tahun dan denda €19,500¹¹.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia*”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap hewan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap hewan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang persetubuhan manusia dengan hewan
- b. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

⁶ <https://news.okezone.com/read/2013/05/09/341/804614/astaga-hendro-tega-setubuhi-kuda>, diakses, pada, 30 september 2018

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-2444765/selain-ratusan-ayam-remaja-tasik-ini-juga-perkosakan-domba>, diakses, pada, 30 september 2018

⁸ *Criminal Law (Sexual Offences And Related Matters) Amendment ACT 32 Of 2007*

⁹ <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/28/22211861/bersetubuh-dengan-keledai-pemuda-23-tahun-divonis-penjara-12-bulan>, diakses, pada, 19 September 2018

¹⁰ French Penal Code 33

¹¹ Wetboek van Strafrecht artikel 254

D. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses yang terjadi.¹²

1. Teori Kebijakan Kriminal

Kriminalisasi adalah bagian integral dari kriminologi, karena kriminalisasi menurut Hoefnagels menjadi salah satu *subject matter* dari kriminologi. Kebijakan kriminalisasi dilakukan sesungguhnya dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Kebijakan atau upaya rasional apapun ditempuh atau dilakukan, asalkan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Walter Reckless sudah menjadi bidang garapan kriminologi. Dalam kriminologi, politik kriminal masuk kedalam lingkup reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu perbuatan yang telah dikriminalisasi dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana, sejatinya merupakan salah satu bentuk formal dari reaksi masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan.¹³

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bossiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:¹⁴

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (*rasionalisasi*) para pelanggar hukum

- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat pula disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah:¹⁵

- a. Ada korban
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan
- c. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah: perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Stjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum adalah aktifitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Padmo Wahjono juga mengartikan politik hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.¹⁷

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 112.

¹³ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana : Asas dan Perkembangan*, Gramata, Bekasi, 2012, Hlm. 112-113

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 23

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, Hlm. 51

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2012, hlm.63

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini, pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif¹⁹.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid* - Belanda atau *Criminal* - Inggris) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok - kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke-21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.²⁰

N.E Algra menyatakan secara leksikal *toerekenbaarheid* berarti dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (dalam arti kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur/elementen) dan tidak dapat alasan penghapusan hukum.²¹ Martias Gelar Radjo Mulano menyatakan *toerekenbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.²²

Meninjau teori dan pendapat para sarjana hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana ini, perbuatan persetubuhan manusia dengan hewan (*zoophilia*) dapat dimintai pertanggungjawabannya karena perbuatan ini tidak masuk pada kategori gangguan jiwa.

Dalam prakteknya, jika penegak hukum memjumpai kasus seperti ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun hakim dapat meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.²³

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan adalah perbuatan mengatur²⁴.
2. Tindak Pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab) (Kanter dan

²¹ *Ibid.* hlm. 80.

²² *Ibid.*

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 61

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses melalui, <https://kbbi.kata.web.id>>pengaturan pada 29 September 2018.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 23.

²⁰ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 78.

Sianturi)²⁵. Dapat diartikan juga bahwa tidak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut didalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya²⁶.

3. Persetubuhan Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani²⁷.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya²⁸.
5. Hukum Pidana Indonesia adalah hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengertian dari hukum pidana itu sendiri ialah menurut Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya²⁹. Selain itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius punendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana³⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta perbandingan hukum³¹. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan

penelitian terhadap beberapa peraturan di negara lain sinkronisasi hukum.

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan³². Bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, majalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur (*legal research*).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Terhadap Hewan

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Hewan

Topeng monyet merupakan sebuah kesenian tradisional di Indonesia, di mana seorang pawang melatih monyet jenis *Macaca Fascicularis* untuk

²⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 99

²⁶ Rocky Marbun *et. al.*, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2012, hlm. 311

²⁷ R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 181.

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 4.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.29

melakukan berbagai aktivitas yang meniru tingkah laku manusia. Misalnya, monyet itu mengenakan pakaian manusia, berdansa, mengemudi sepeda, dan yang paling mengherankan, merokok kretek. Monyetnya diikat dengan rantai dileher, dan tangan pawang monyet bermain gendang atau gamelan, sambil tangan yang lain memegang tali pengikat monyet. Para penonton melihat miniatur sirkus ini sebagai hal yang lucu dan tertawa sambil menyodorkan selebar rupiah yang diminta-minta oleh monyet. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu proses penyiksaan yang terjadi sebelum kera tersebut menjadi bintang pertunjukan topeng monyet.³³

Frank dan Kenneth mendefinisikan kekerasan terhadap hewan sebagai perilaku yang tidak disengaja, tidak dapat diterima secara sosial yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan atau kesusahan terhadap dan / atau kematian hewan.³⁴ Delik omisi atau komisi yang dicakup oleh definisi ini serupa pada kasus pelecehan dan penelantaran anak, kekerasan pasangan intim (KDRT), dan penganiayaan terhadap orang dewasa lanjut usia atau orang dewasa penyandang cacat dengan mengganti korban manusia untuk korban hewan. McMillan pada tahun 2005 memusatkan perhatiannya pada perlakuan yang tidak wajar secara emosional terhadap hewan, suatu bentuk penganiayaan yang jelas-jelas termasuk dalam definisi kami tetapi belum ditangani secara sistematis dalam penelitian. Studi empiris tentang pelecehan terhadap hewan sering kali memasukkan definisi atau varian yang kami kemukakan, tetapi kami mengakui bahwa definisi tersebut dapat dianggap sempit karena konsepsi pelecehan hewan di luar perilaku sosial yang tidak dapat

diterima juga memerlukan penyelidikan.³⁵

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan

Menurut Mogbo Tochukwu dari Nnamdi Azikiwe University, Awka dalam penelitiannya, membagi bentuk-bentuk kejahatan terhadap hewan dan memasukkan perbuatan persetubuhan dengan hewan (*Bestiality*) kedalamnya. Diantaranya :³⁶

- a. Pengabaian sederhana (*simple neglect*)
- b. Penelantaran disengaja
- c. Perlakuan yang tidak pantas yang disengaja
- d. Penimbunan Hewan
- e. Penyalahgunaan Yang Terorganisir — Pertarungan Anjing dan Sabung Ayam
- f. Penyalahgunaan Ritualistik
- g. Penyerangan Seksual Terhadap Hewan (*Bestiality*)

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens si rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.”³⁷

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan

³³ Anton Lucanus, “Topeng Monyet: Kesenian Tradisional Indonesia Atau Kekejaman Terhadap Hewan?”, *Artikel The University Of Western Australia*, hlm 1

³⁴ Frank R Ascione dan Kenneth J Shapiro, “Animal studies Repository : People and Animals, Kindness and Cruelty : Research Direction and Policy Implications”, *Journal Of Social Issu*, Vol 9, 2009, hlm. 2

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mogbo Tochukwu, “Animal Cruelty: A Review”, *Journal of Natural Sciences Research* : Vol.3, No.8, 2013, hlm. 95.

³⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, Hlm. 61

pidana kepadanya. Syarat subyektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subyektif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kelapaaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum *common law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakana hukum.³⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan⁴⁰.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan

sebagai:⁴¹ “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya yang dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

3. Kebijakan Kriminalisasi

Menurut Muladi, kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukann secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana *non penal* melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum dan sebagainya.⁴²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum obyektif adalah kekuasaan yang bersifat mengatur, hukum subyektif adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi ini tidak berarti, bahwa hukum tidak lain dari pada kekuasaan belaka. Tidak berarti bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua perkataan untuk hal yang satu dan sama. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. *Might is not right*, kata pepatah inggris yang terkenal.⁴³

Hidup manusia memiliki dua segi : manusia adalah perseorangan dan manusia adalah makhluk sosial. Kesusilaan manusia

³⁸ *Ibid.* hlm. 62

³⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 124

⁴⁰ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm.23.

⁴¹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pid...*, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁴² M. Ali Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 262.

⁴³ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 57

sebagai perseorangan, hukum dan adat menyangkut masyarakat. Kesusilaan memberi peraturan untuk seseorang. Sebaliknya, hukum dan adat ditujukan pada manusia sebagai makhluk masyarakat. Ia tidak menghendaki kesempurnaan manusia, melainkan kesempurnaan masyarakat. Antara hukum dan adat pada satu pihak dan kesusilaan pada pihak lain memiliki perbedaan tujuan. Tujuan hukum ialah tata tertib masyarakat yang baik. Tujuan kesusilaan ialah penyempurnaan seseorang (walaupun menimbulkan juga akibat-akibat untuk hidup bersama, karena perbaikan manusia tentunya turut membantu tercapainya tata tertib masyarakat yang lebih baik.⁴⁴

Begitu pula pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap hewan yang menimbulkan kerugian yang besar baik jiwa, materi dan kelangsungan hidup generasi kedepan. *Bestiality* atau *zoophilia* adalah sebutan atau istilah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan atau aktifitas seksual lainnya yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan. baik itu laki-laki maupun perempuan. Perbuatan ini paling besar dipengaruhi oleh faktor psikologi yang, pelaku *bestiality* tidak menyalurkannya pada lawan jenis secara legal.

Meninjau beberapa peraturan yang terkait dengan hewan dalam hukum positif Indonesia, baik itu kesejahteraan hewan dan kesehatan hewan lainnya diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Yang disebut dengan tindak penganiayaan ringan terhadap binatang atau *lichte dieren mishandeling* oleh pembentuk undang-undang telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP.

Pasal ini menjelaskan penganiayaan ringan terhadap hewan yang dilakukan dengan sengaja yang menunjukkan bahwa si pelaku sadar melakukan penganiayaan tersebut, bukan dengan kelalaian. Dikatakan pelaku penganiayaan apabila seseorang atau badan hukum terbukti melakukan penganiayaan tersebut. Selain penganiayaan, huruf a ayat (1) juga

melarang seseorang melakukan perusakan kesehatan yang dimiliki hewan. adapun penjabaran tentang penganiayaan ringan terhadap hewan dan perusakan kesehatan hewan pada pasal ini berupa menyakiti hewan tanpa maksud tertentu atau justeru melewati batas kemampuan hewan. Ini sering terjadi pada hewan peliharaan di rumah seperti kucing yang ditendang, atau melemparkan hewan dari suatu tempat yang lebih tinggi. Adapun objeknya adalah hewan sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh manusia ataupun badan hukum.

Adapun dalam huruf b, penelantaran hewan dan tidak memberikan kehidupan yang layak juga termasuk pada penganiayaan terhadap hewan. tidak memberikan dan tidak mengupayakan pengobatan hewan yang dimiliki juga masuk pada tidak memberikan kehidupan yang layak bagi hewan peliharaannya.

Kata binatang itu mempunyai pengertian yang lebih luas dari ternak, hingga dapat dimasukkan kedalam pengertiannya, yakni kuda, anjing, kera, kelinci, tikus, dan binatang-binatang lain yang biasa dipakai orang untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah di dalam laboratorium-laboratorium⁴⁵.

Namun dalam KUHP ini, kita tidak bisa menemukan dan tidak bisa langsung menafsirkan bahwa persetubuhan manusia dengan hewan merupakan sebuah tindak pidana yang diatur didalamnya. Karena Pasal ini tidak menyebutkan secara konkrit larangan perbuatan itu. Namun perbuatan itu sudah diluar batas normal seorang manusia. *Bestiality* ini bukan hanya merugikan hewan saja, melainkan pelaku *bestiality*, memiliki hewan yang dirugikan secara ekonomi bahkan masyarakat setempat juga dapat dirugikan.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 22-23

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 276.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam ayat (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa :

“kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.”

Begitu juga dalam hal pemeliharaan hewan, huruf c ayat (2) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa “pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan”. Dalam huruf e ayat (2) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa “penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan”. Huruf g ayat (2) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan juga menyatakan bahwa perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalagunaan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hewan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan memiliki perkembangan kearah yang lebih baik. Tapi, dikaitkan dengan *bestiality*, peraturan ini tidak bisa mengikat langsung terhadap pelaku yang terbukti. Perlu ada penafsiran dan penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh majelis hakim agar tidak keliru. Serta kalimat “penyalahgunaan hewan” memiliki arti yang abstrak dan begitu luas.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyebutkan bahwa :

“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Hal-hal yang dilarang lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan yaitu dalam ayat (1) Pasal 99 :

- a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi Hewan
- b. Memutilasi tubuh Hewan
- c. Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan; dan
- d. Mengadu Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.

Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dilakukan uji forensik oleh ahli. Yang mana ahli ini langsung ditunjuk oleh undang-undang yaitu Dokter Hewan. Namun, peraturan ini juga

memiliki kelemahan yaitu sanksi terhadap pelaku yang melanggar larangan dalam peraturan pemerintah ini.

Untuk mencegah perbuatan *bestiality* (aktifitas seksual terhadap hewan), Maka diperlukan aturan yang tegas dan konkrit untuk melindungi generasi penerus bangsa, sebagai kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap hewan. Karena diantara peranan hukum dalam masyarakat bahwa manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai dengan mati, hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia. Melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu hingga menjaga jenazah manusia setelah meninggal dunia.⁴⁶

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan

Hukum merupakan produk dari proses politik. Dengan demikian, di dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang, yang paling dominan adalah adanya keinginan politik, baik yang datang dari pemerintah, maupun yang berasal dari para anggota legislatif. Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Tujuan teori hukum politik adalah untuk membebaskan hukum dari keabstrakannya (umum) dan menonjolkan implikasi-implikasi (pengaruh) politik dari hukum. Hukum dipandang sebagai kategori politik, yaitu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang baik dan adil.⁴⁷

Menurut Pringgodigdo, kebijaksanaan (*policy:beleid*) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dibidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki yang orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat

bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi.⁴⁸

Pembaharuan hukum secara *etimologis*, berarti suatu hal yang “lama” dan “sedang”, dalam proses untuk diperbaharui, maka hal tersebut identik dengan perubahan. Meskipun pada saat undang-undang dibuat, rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, seiring terdapat undang-undang yang mengandung *error*, jika terjadi hanya *printing error*, tidak menjadi masalah serius. Akan tetapi, ada *error* yang sangat kontroversial. Antara lain :⁴⁹

1. *LII-considered*, pada saat merumuskan, keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan di rumuskan tergesa-gesa.
2. Bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi.
3. Bahkan bisa terjadi konflik antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

Menurut para sarjana, bahwa yang tidak mampu bertanggung jawab adalah mereka yang : jiwanya terganggu oleh penyakit, jiwanya dalam keadaan tidak sadar, jiwanya cacat dalam pertumbuhannya. Dalam Pasal 44 KUHP, yang dimaksud dengan keadaan jiwa “yang cacat karena pertumbuhannya” ialah seorang yang dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai : “dungu”, setengah mateng atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan seseorang.⁵⁰

Meninjau Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pendekatan kebijakan kriminalisasi tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) menggunakan pendekatan metode evolusioner, seperti yang dijelaskan diatas. RUU KUHP mengamandemen dan menyisipkan aturan baru dalam suatu pasal

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 25

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.12.

⁵⁰ Erdianto, *Op.cit.*, hlm. 85

⁴⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50

⁴⁷ Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 74

yang berkaitan dengan kekerasan terhadap hewan. Yaitu pada huruf c Pasal 501 RUU KUHP yang berbunyi : dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (tiga puluh juta rupiah) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan. Dikaitkan dengan pandangan Mahfud MD tentang karakter produk hukum, dengan menyisipkan dan menkriminalisasi perbuatan persetubuhan dengan hewan, RUU KUHP merupakan produk hukum *responsive* yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Yang menarik dari aturan ini adalah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti yaitu pidana penjara dua tahun ditambah dengan denda senilai tiga puluh ribu euro yang mana kalau dirupiahkan pada saat ini denda tersebut bisa mencapai angka empat ratus delapan puluh jutaan. Secara aturan, pelarang *bestiality* jelas dilarang dalam KUHP Prancis dan disebutkan secara konkrit. Sehingga para penegak hukum tidak perlu menafsirkan kembali perbuatan tersebut. Tinggal diklasifikasikan termasuk perbuatan seksual yang seperti apa dan perlakuan apa saja (dalam hal seksual) yang dilakukan manusia dengan binatang.

Maka penulis berpendapat, aturan tentang persetubuhan terhadap hewan di Indonesia dalam RUU KUHP memiliki sanksi yang lebih ringan di bandingkan dengan negara Prancis dan Belanda. Dapat dilihat dari besaran penjatuhan sanksi denda terhadap pelaku yang terbukti. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai adat. Dengan menyamakan besaran sanksi denda dengan negara Prancis atau Belanda, dapat meminimalisir persetubuhan terhadap hewan terjadi dan membuat jera pelaku yang terbukti. Faktor yang menjadikan alasan menyamakan denda dengan KUHP Prancis atau KUHP Belanda adalah pertama, sama-sama negara dengan sistem hukum *civil law*. Faktor kedua adalah untuk mengurangi beban negara dalam membiayai lembaga permasyarakatan. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana yang lebih baik kedepannya dalam menanggulangi persetubuhan terhadap hewan harus dibarengin dengan pembentukan

peraturan yang lebih ideal untuk menjawab persoalan yang timbul ditengah masyarakat sehingga kedepannya persetubuhan terhadap hewan tidak terjadi kembali dan kesejahteraan hewan menjadi lebih baik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara konkrit dan jelas baik didalam KUHP serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan hewan. diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.
2. Kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap hewan diatur dalam huruf c Pasal 501 RUU KUHP. Hingga saat ini, RUU KUHP berada pada tahap kebijakan legislative masih belum berlaku. Sedangkan para pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya. Mengadopsi beberapa aturan persetubuhan terhadap hewan dari Prancis atau Belanda dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Untuk mencegah perbuatan *bestiality* (aktifitas seksual terhadap hewan), Maka diperlukan aturan yang tegas dan konkrit untuk melindungi generasi penerus bangsa, sebagai kebijakan hukum yang baik serta pembaharuan hukum pidana dan juga perlindungan terhadap hewan. Dengan mendesak eksekutif dan legislatif untuk merampungkan pembahasan RUU KUHP serta mempertegas larangan *bestiality*, dapat menjadikan hukum pidana sinkron dan sesuai dengan lkehidupan masyarakat.

2. Mengadopsi aturan tentang *bestiality* di Perancis dan Belanda merupakan kebijakan hukum pidana yang baik. Namun besaran sanksi denda disesuaikan dengan perekonomian di Indonesia. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku, dapat dialokasikan sebagai dana untuk pencegahan rabies pada hewan, pendanaan *shelter* hewan terlantar atau hewan korban kecelakaan atau semacamnya untuk kesejahteraan hewan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Wiramihardja, Sutardjo, 2012, *Pengantar Psikologi Klinis Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2009, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arkow, Frank R. Ascione dan Phil, 1999, *Child Abuse, Domestic Violence, and Animal Abuse*, Purdue University Press, Indiana.
- Ascione, Randall Lockwood dan Frank R, 1998, *Cruelty To Animals And Interpersonal Violence*, Purdue University Press, Indiana.
- Asikin, Amirudin dan Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Baur, Robert Cooks dan Karla, 2005, *Our Sexuality 9th edition*, Thomson Learning, California.
- Botzler, Susan J Armstrong dan Richard G, 2017, *The Animal Ethics Reader Third Edition*, Routledge, New York.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya, Nyoman, Sarikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Lamintang, P.A.F Lamintang dan F.T, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F Lamintang dan Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sadock, Kaplan, 2016, *Buku Ajar Psikiatri Klinis Bagian 2*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Sianturi, E.Y Kanter dan S.R, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo ,R., 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Thohari, Imam Syaukani dan A Ahsin, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria, 2011, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal /Artikel/ Makalah/Kamus/Tesis

- Emilda Firdaus, 2007, “Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1 Mei.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses melalui <https://kbbi.kata.web.id>>pengaturan diakses pada 29 September 2018.
- Marbun, Rocky dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta Selatan.
- Nguyen, Nam, Essential 25000 English-Indonesian Law Dictionary, diakses di Google Book pada 17 September 2018
- United States Of America Plaintiff-Appellee, v. Anthony Petrov, Defendant-Appellant, *Jurnal Westlaw*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses, pada, 11 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google
- Wisnubroto, Aloysius, 1997, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Shapiro, Frank R Ascione dan Kenneth J, 2009, “Animal studies Repository : People and Animals, Kindness and Cruelty : Research Direction and Policy Implications”, *Journal Of Social Issu*, , Universitas Danvers, Vol 9.
- Gharebaghi, Reza dkk, “Animal Rights In Islam” makalah disampaikan pada *Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life*

Sciences, Tokyo, Japan, Augustus 21-25, 2007.

Mampow, Jonathan Toar, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan" Artikel Pada *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5, No. 2 Maret-April 2017.

Tochukwu, Mogbo, "Animal Cruelty: A Review", *Journal of Natural Sciences Research*, Vol.3, No.8, 2013

Chandra, Widya Dika, "Penegakan Hukum Pasal 302 Kuhp Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta" Artikel Pada *Jurnal Novum*, Vol 1, No 1, 2019, hlm 4 diakses melalui internet pada 26 Februari 2019.

Rahmawati, Salfia, "Fenomena Bestiality dan Spectrophila Pada Masyarakat Jawa Dalam Serat Narasawan (PNRI/ AS 75)" Artikel Universitas Gajah Mada, Oktober, 2016.

Anton Lucanus, 2014, "Topeng Monyet: Kesenian Tradisional Indonesia Atau Kekejaman Terhadap Hewan?", *Artikel The University Of Western Australia*, Australia.

Interest of Amicus Curiae, September 2018, "Appendix Section", *Jurnal Westlaw*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses, pada, 11 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015

Criminal Law (Sexual Offences And Related Matters) Amendment ACT 32 Of 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis (French Penal Code 33)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht)

D. Website

<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/28/22211861/bersetubuh-dengan-keledai-pemuda-23-tahun-divonis-penjara-12-bulan>, diakses, pada, 19 September 2018

<https://news.detik.com/berita/d-2444765/selain-ratusan-ayam-remaja-tasik-ini-juga-perkosa-domba>, diakses, pada, 30 september 2018

<https://news.detik.com/berita/d-2445447/4-kasus-seks-menyimpang-dengan-binatang-di-indonesia/2>, diakses, pada, 10 September 2018

<https://news.okezone.com/read/2013/05/09/341/804614/astaga-hendro-tega-setubuhi-kuda>, diakses, pada, 30 september 2018

<https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-orang-setubuhi-binatang-ini-gegerkan-pulau-dewata/abg-kepergok-bersetubuh-dengan-sapi.html>, diakses, pada, 4 September 2018

<https://psikologi.net/gangguan-seksual/>, diakses, tanggal, 28 Februari 201